

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	18
1. Manfaat teoritis:.....	18
2. Manfaat Praktis.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.....	20
B. Tinjauan Umum Keputusan Fiktif Negatif dan Keputusan Fiktif Positif..	28
1. Keputusan Fiktif Negatif.....	28
2. Keputusan Fiktif Positif.....	30
C. Tinjauan Umum Peradilan Tata Usaha Negara.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
B. Bahan Penelitian.....	42
1. Bahan Hukum Primer.....	43
2. Bahan Hukum Sekunder.....	45

C.	Cara Pengumpulan Data	46
1.	Teknik Pengumpulan Data	46
2.	Alat Pengumpul Data	46
D.	Jalannya Penelitian	47
1.	Tahap persiapan	47
2.	Tahap Pelaksanaan	47
3.	Tahap Penyelesaian	47
E.	Analisis Hasil Penelitian.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
A.	Konsep Prinsip Fiktif Negatif dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.....	49
B.	Konsep Prinsip Fiktif Positif dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.....	74
C.	Eksistensi Konsep Prinsip Fiktif Negatif Terkait Munculnya Konsep Prinsip Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	107
1.	Selayang Pandang Pengadilan Tata Usaha Semarang	107
2.	Catatan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.....	110
3.	Eksistensi Prinsip Fiktif Negatif di Pengadilan Tata Usaha Semarang	118
BAB V PENUTUP		125
A.	KESIMPULAN.....	125
B.	SARAN.....	127
1.	Bagi Lembaga Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat).....	127
2.	Bagi Penyelenggara Negara	128
3.	Bagi Lembaga Peradilan	129
4.	Bagi Praktisi dan Akademisi.....	130
DAFTAR PUSTAKA		131
A.	Buku	131
B.	Artikel Jurnal.....	133
C.	Tugas Akhir	134
D.	Internet	134



E. Peraturan Perundang-undangan.....	135
F. Putusan/ Penetapan.....	136
LAMPIRAN	138